

# TC MEDIA

I N S P I R A S I   U N T U K   B E R S I N E R G I

## *setgo* IMPACT

INTEGRITY   ADAPTIVE

MODERN   COLLABORATIVE

PROFESSIONAL   TRANSFORMATIVE

## MENUJU ZI-WBK

---



---

Menuju ZI-WBK

**Sekretariat Pengadilan Pajak**

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

**Laman**

[setpp.kemenkeu.go.id](http://setpp.kemenkeu.go.id)

**Surel**

[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

**Instagram**

[setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

[tcmedia\\_pp](https://www.instagram.com/tcmedia_pp)

# DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 128 TAHUN 2023

<b>Editorial</b>	<b>4</b>
Integritas Wujud Moral yang Tinggi	
<b>Infografis</b>	<b>5</b>
Bintang Penghargaan Pegawai	
<b>Foto Kita</b>	<b>6</b>
<b>Lintas peristiwa</b>	<b>8</b>
<b>Fokus</b>	<b>10</b>
Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	<b>12</b>
Podcast Integritas	<b>14</b>
Tagline Baru Set.PP	<b>15</b>
Fakta Media Sosial	<b>18</b>
Etika Bersosial Media	
<b>Perpajakan</b>	<b>21</b>
Reformasi Perpajakan - Bagian 1	
<b>Lokus</b>	<b>23</b>
Penegakan Disiplin Jam Kerja	<b>26</b>
Nilai Kinerja Organisasi	
<b>Profil</b>	<b>28</b>
Generasi Baru Set.PP	
<b>IT</b>	<b>30</b>
Chat GPT	
<b>Rona</b>	<b>32</b>
Literasi Keuangan Anak	
<b>Quiz</b>	<b>34</b>
Bantu si Domba	
<b>Komik</b>	<b>35</b>
SiTaco #09: Mewah	



Tim Penyusunan TC Media Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-13/SP/2023 tanggal 15 Februari 2023

**Pengarah I:** Sekretaris Pengadilan Pajak

**Pengarah II:** Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

**Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

**Redaktur Umum:** Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi

**Redaktur Pelaksana:** Gilang Pratama

**Penyunting:** Rizki Damayanti, M. Hafizullah Lubis

**Desain Grafis dan Fotografer:** Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah

**Tim Redaksi:** Gabriella Grace, Astris Dyah Perwita, Heru Nugroho, Mega Nurmalasari, Mutia Rizki, Rahma Noor Fadhila, Risya Ayu, Sukindar Ari Santoso



# PENGHARGAAN PEGAWAI

63% responden menyatakan setuju untuk menambahkan penghargaan yang ramah milenial, berdasarkan Survei Evaluasi Kebijakan Penghargaan di Kementerian Keuangan pada tanggal 4 s.d. 8 Desember 2020.

## Yuk Gunakan 10 Bintang Penghargaanmu Sebagai Bentuk Apresiasi untuk Pegawai!

Cara Pemberian Bintang Penghargaan Pegawai:

1. Login ke [satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id),
2. Pilih menu "Performa" di menu bagian atas,
3. Masuk ke sub menu "Penghargaan Pegawai",
4. Pilih menu "Beri Penghargaan",
5. Cari nama pegawai yang akan diberikan penghargaan,
6. Klik tombol "Beri Bintang",
7. Ketik alasan pemberian Bintang Penghargaan, agar pegawai yang kamu kasih penghargaan mengetahui alasan mendapat penghargaan darimu,
8. Klik tombol "Berikan",
9. Selesai.



Perlu diketahui bahwa setiap bulan masing-masing pegawai memiliki **10 kuota Bintang Penghargaan** yang dapat diberikan kepada rekan kerja, rekan lintas unit, bawahan, atau bawahan rekan kerja.

# integritas wujud nilai moral yang tinggi



Integritas adalah suatu nilai moral yang sangat penting untuk dipupuk dalam diri individu maupun masyarakat. Tanpa integritas, tidak ada kepercayaan dan nilai moral yang tinggi dalam berinteraksi dengan orang lain. Integritas meliputi berbagai aspek, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan komitmen pada nilai-nilai yang baik. Namun, mengapa integritas seringkali menjadi suatu hal yang terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali, kita melihat orang-orang yang melakukan kecurangan atau perilaku yang tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari bisnis, politik, pendidikan, dan bahkan di dalam lingkungan keluarga.

Ketika integritas diabaikan, dampaknya bisa sangat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kecurangan dalam bisnis dapat merusak reputasi perusahaan dan memengaruhi kredibilitas pasar. Sementara itu, kecurangan dalam politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk merawat dan memupuk integritas demi mewujudkan kehidupan yang bermoral dan berkeadilan.

Dalam edisi ini, TC Media menyajikan beragam tulisan mengenai fenomena dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung integritas yang tinggi, antara lain terkait dengan kepatutan dalam bermedia sosial, mewujudkan lingkungan kerja yang mencapai kategori ZI-WBK, dan hukuman disiplin apabila seorang pegawai melanggar integritas.





Ruang Kolaborasi  
Foto  
Faishal Chairu



## Rekrutmen Hakim Baru

**Jakarta, 10 Januari 2023.** Pada tahun 2022 Pengadilan Pajak telah melaksanakan rekrutmen Hakim. Seleksi diawali dengan seleksi administrasi dan kemudian dilanjutkan dengan tes pengetahuan perpajakan dan penulisan *paper*. Jumlah peserta hingga tahap tes pengetahuan perpajakan dan penulisan *paper* ialah 222 orang. Adapun cakupan materi tes terdiri dari tes pengetahuan umum dan tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanaan dan cukai. Selanjutnya para peserta yang lolos tes pengetahuan dan penulisan paper mengikuti tes kesehatan dan akhirnya terpilih 17 Hakim baru di lingkungan Pengadilan Pajak yang terdiri dari 14 Hakim di bidang Perpajakan dan 3 Hakim di bidang Bea dan Cukai.

Teks Tirta Foto Faishal



## Hasil SKPL 2022

**Jakarta, 19 Januari 2023.** Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2022 dilaksanakan secara daring dan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Pelaksanaan survei ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai layanan administrasi Izin Kuasa Hukum dan layanan penerimaan Banding/Gugatan. Berdasarkan hasil survei, Sekretariat Pengadilan Pajak berhasil meraih kategori penilaian “Baik atau Sangat Memuaskan” dengan nilai indeks capaian untuk layanan administrasi Izin Kuasa Hukum sebesar 4,32 dan layanan penerimaan Banding/Gugatan sebesar 4,30 dalam Skala Indeks 1 s.d. 5. Capaian ini merupakan capaian terbaik dan menjadi pacuan untuk tidak segera berpuas diri.

Teks Kasya Foto Faishal



## Pemilihan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak

**Jakarta, 24 Januari 2023.** Pengadilan Pajak melaksanakan pemilihan Wakil Ketua (Waka) III untuk bidang monitoring yang bertempat di Aula BPKP. Pemilihan tersebut diikuti oleh 12 orang calon dengan prasyarat antara lain menjabat posisi Hakim Ketua Majelis, berusia maksimal 64 tahun (3 tahun sebelum usia pensiun) dan dapat hadir pada saat pemilihan berlangsung. Proses pemilihan berjalan 2 (dua) kali putaran. Putaran pertama terdiri dari 12 calon yang kemudian mengerucut menjadi 2 calon, yaitu Yang Mulia Juwari Eddy Winarto dan Yang Mulia Erry Sapari Dipawinangun. Waka III Terpilih adalah Yang Mulia Erry Sapari Dipawinangun. Adapun Waka III sebelumnya adalah Yang Mulia Hakim Seno Sulistyanto Budi Hendra.

Teks Tirta Foto Faishal



## Pembukaan Harlah PP

**Jakarta, 27 Januari 2023.** Pembukaan Rangkaian Kegiatan Hari Lahir Pengadilan Pajak ke-21 dilaksanakan pada Jumat, 27 Januari 2023 di Lapangan Gedung A Pengadilan Pajak. Ceremonial Pembukaan Rangkaian Kegiatan dalam rangka Peringatan 21 Tahun Pengadilan Pajak diawali dengan senam dan sarapan bersama. Adapun rangkaian kegiatan dan lomba di Lingkungan Pengadilan Pajak, terdiri dari Voli, Basket, Tenis Meja, Catur, Lari, Bulutangkis, Panahan, Karambol, Gapple, Game Online, *Amazing Race*, Berpacu dalam Melodi, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Dirgahayu pengadilan Pajak ke 21.

Teks Kasya Foto Dok. Set.PP



## Penandatanganan Kontrak Kinerja Hakim

**Jakarta, 24 Februari 2023.** Penandatanganan Kontrak Kinerja Hakim Pengadilan Pajak telah dilaksanakan di ruang kerja Ketua Pengadilan Pajak. Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh pimpinan Pengadilan Pajak dan secara simbolis dilakukan oleh beberapa perwakilan hakim yang ditunjuk. Proses penandatanganan diawali dengan arahan dari Ketua Pengadilan Pajak dan ditutup dengan foto bersama. Dalam arahnya, Ketua Pengadilan Pajak menyampaikan bahwa Pengadilan Pajak telah meningkatkan kinerjanya sebanyak 111,53% dari tahun sebelumnya. Di samping itu, beliau juga berharap bahwa semoga tahun ini menjadi berkah dan apa yang menjadi target pada tahun ini dapat dicapai dengan baik.

Teks Kasya Foto Faishal



## Kegiatan Ramadhan

**Jakarta, 23 Maret 2023.** Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Rohis Sekretariat Pengadilan Pajak kembali mengadakan kegiatan dalam rangka menyambut Ramadhan, yaitu Tarhib Ramadhan, Tadarus Qur'an, Ta'jil, Nuzulul Qur'an, Donasi Nasi Kotak, Tarawih, Lomba Ramadhan, I'tikaf, Motivasi Ramadhan, serta ditutup dengan acara Halal bi Halal Pengadilan Pajak. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh pegawai, namun juga dapat diikuti oleh pegawai bersama keluarga sebagai bagian dari kebersamaan selama Ramadhan. Selamat Menunaikan Ibadah Puasa ya guys!

Teks Kasya Foto Faishal



# Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi

**S**et. PP terpilih menjadi salah satu dari sekian banyak unit di Kementerian Keuangan yang diberikan tugas untuk menyusun upaya pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Upaya ini dimulai dengan pencanangan ZI-WBK pada tanggal 16 Desember 2022 yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI-WBK.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, ZI-WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Tujuan dari ZI-WBK adalah untuk

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas sebuah organisasi, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan ZI-WBK ini sendiri, Sekretaris Pengadilan Pajak telah membentuk suatu tim kerja yang disusun berdasarkan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembangunan ZI-WBK. Komponen yang dimaksud terdiri dari enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan integritas kepada seluruh pegawai dan webinar (*podcast*) integritas. Semua kegiatan di dalam rencana kerja tim nantinya dilaporkan dalam bentuk laporan yang akan dinilai oleh evaluator. Apabila semua komponen penilaian terpenuhi, maka tahun ini Set.PP akan memperoleh predikat ZI-WBK.

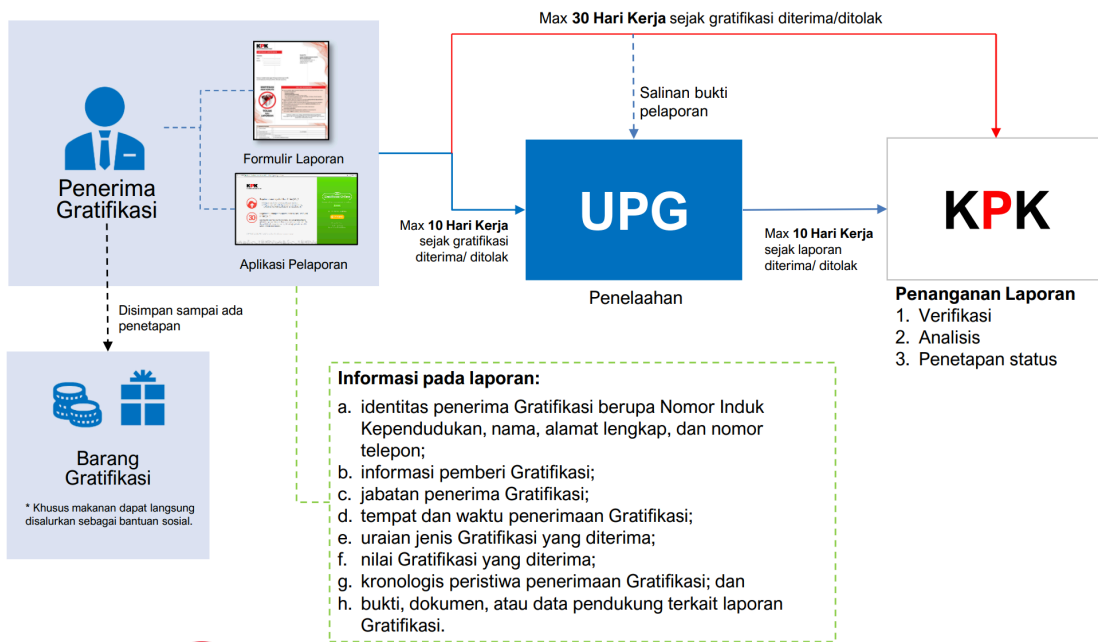
**Pembinaan Integritas**

Persoalan integritas yang sedang ramai dibicarakan, membuat Kode Etik dan Kode Perilaku yang berbunyi “Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai.”, semakin gencar disosialisasikan. Hal ini juga disampaikan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Bapak Budi Setyawan MNY, pada Pembinaan Integritas yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2023. Gaya hidup hedonis memang menjadi isu utama yang sering dikaitkan dengan isu integritas. Beliau juga menyampaikan bahwa pembinaan integritas akan terus menerus disampaikan secara rutin, di mana dapat dijadikan sebagai pengingat dalam menyikapi isu-isu yang ada.

Dalam keseharian sebaiknya para pegawai dapat

menjadi role model bagi rekan-rekannya sehingga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan kerja. Lalu dalam menyikapi semua pemberitaan di media sosial harus dilakukan secara proporsional. Para pegawai juga dapat sekaligus menjadi *public relations* (PR) bagi unit dengan turut menyebarkan konten-konten positif yang dibagikan oleh kanal Kementerian Keuangan. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak mengharapkan para pegawai dapat melaksanakan dan saling mengingatkan terkait integritas khususnya terkait perilaku hedonisme dan bijak bersosial media.

Pada acara yang sama, Kepala Subbagian Kepatuhan Internal, Bapak Singgih Rachma Hadi, menyampaikan hal-hal terkait pelaporan gratifikasi. Perlu diketahui bagi para pegawai bahwa di Sekretariat Pengadilan Pajak terdapat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-07/SP/2023, dengan keanggotaan: Sekretaris Pengadilan Pajak sebagai Penanggung Jawab, Ilhan Lasahido sebagai Ketua UPG, dan Singgih Rachma Hadi, Failani Hendro Saputro, dan Felixita Novelia Christiana Dewi sebagai anggota.



**Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG**

UPG memiliki tugas dalam hal memberikan asistensi pelaporan gratifikasi dan pertimbangan terkait gratifikasi, mengelola pelaporan gratifikasi melalui UPG, menyusun dan melaksanakan program pengendalian gratifikasi, melaksanakan sosialisasi/ internalisasi terkait gratifikasi serta melakukan pemetaan area rawan gratifikasi.

Sesuai dengan PMK-277/PMK.09/2021 tentang Penanganan Gratifikasi di Kementerian Keuangan, kewajiban Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yaitu menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, melaporkan penolakan/ penerimaan gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK, dan melapor penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan peraturan UU dan/atau penetapan KPK, melalui UPG

atau langsung ke KPK.

Kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.

### Podcast Integritas

Pada tanggal 17 Maret 2023, Sekretariat Pengadilan Pajak mengundang R. Patrick Wahyudwisaksono S.E., M.Ak, CPM, CIO, CRMP, Asesor Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas KPK, sebagai narasumber Webinar Integritas untuk menyampaikan paparan terkait budaya integritas dengan tema *“Lifestyle Choices and Integrity: Exploring the Impact on ASN’s Public Image”*.

Dalam webinar tersebut, beliau menyampaikan



**Dibalik Layar Podcast**  
Foto  
Faishal Chairu

latar belakang diperlukannya penguatan budaya integritas antara lain karena menurunnya hasil Survey Indeks Persepsi Integritas, munculnya kasus di media sosial tentang aksi pamer kemewahan dan gaya hidup hedonisme, dan arahan Menteri Keuangan tentang korupsi dan meminta mengklarifikasi kepada para pejabat/pegawai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar atau tidak melaporkan dengan benar serta arahan penguatan tiga lini pertahanan.

Korupsi masih terjadi di sekitar kita. Perbuatan hukum ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Korupsi.

Pengertian korupsi berdasarkan UU Tipikor adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan yang didapat dari jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Jenis korupsi antara lain gratifikasi, penyuapan, penggelapan, tindakan pemerasan, adanya benturan kepentingan, dan yang dapat merugikan negara. Faktor penyebab korupsi dari sisi individu maupun organisasi terdiri dari adanya sifat manusia yang serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah, adanya aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisai.

Korupsi sangat bertentangan dengan integritas, di mana gratifikasi dapat menjadi sumber awal adanya korupsi. Perilaku hedonisme dan suka pamer harta kekayaan juga sebagai bagian dari virus korupsi, di mana perilaku tersebut tidak sesuai Kode Etik Perilaku ASN.

Dalam melawan korupsi diperlukan partisipasi masyarakat dengan cara melihat, mendengar, dan melaporkan setiap ada indikasi Korupsi maupun pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan berani, jujur, berkompeten dan berdaya sebagai penegak di bidang Anti Korupsi. Diperlukan juga Trisula Penanganan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi agar orang tidak ingin berbuat, melalui pencegahan agar orang dan organisasi menciptakan budaya integritas untuk melawan korupsi dan melalui penindakan agar memberikan efek jera bagi koruptor.

Hal yang dapat dilakukan untuk membangun budaya integritas yaitu mengenalkan kerangka integritas dalam mendukung Zona Integritas dan WBK/WBBM, jujur, amanah dan komitmen pada pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku, dan bekerja dengan hati dan menjaga keluarga sesuai ajaran agama.

Teks: Riz dan Dhila



# IMPACT

integrity modern professional adaptive collaborative transformative

## Tagline Set.PP

### Menuju ZI-WBK dengan Semangat Baru

Pada momen pembinaan integritas oleh pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 28 Februari 2023 yang lalu, dirilis pula *Tagline* Set.PP. Tagline ini bertajuk IMPACT yang merupakan singkatan dari *Integrity, Modern, Professional, Adaptive, Collaborative, dan Transformative*. Tagline ini diharapkan akan menjadi semangat baru untuk Set.PP yang lebih baik.

Mari kita dalami lebih lanjut makna pada setiap nilai-nilai pada IMPACT.

#### Integrity

Integritas merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi di Kementerian Keuangan. Tanpa ragu, integritas juga menjadi bagian utama pada tagline Set.PP. Nilai ini bertujuan untuk menunjukkan pegawai Set.PP yang berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

#### Modern

Pegawai Set.PP merupakan pegawai yang terbuka terhadap perkembangan teknologi. Pegawai akan terus belajar dan dapat menerapkan metode serta alat terkini agar meningkatkan kualitas kerja. Selain itu juga menunjukkan pegawai Set.PP yang cepat beradaptasi dan tanggap dalam penguasaan teknologi terkini.

#### Professional

Pegawai Set.PP merupakan seorang yang ahli di bidangnya, bekerja dengan tuntas dan akurat, penuh tanggung jawab, dan berkomitmen. Pegawai Set.PP tidak berhenti untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan, serta dapat melakukan manajemen waktu dengan baik dan bekerja dengan hati.

#### Adaptive

Pegawai Set.PP dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang terjadi dengan semangat yang disertai dengan kemampuan berinovasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus dapat disikapi dengan proaktif dan diselesaikan dengan solusi-solusi yang kreatif.

#### Collaborative

Pegawai Set.PP sebagai pegawai yang kolaboratif harus dapat membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif baik untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

#### Transformative

Pegawai Set.PP yang dekat dengan inovasi dan kreatifitas perlu melakukan perubahan yang berdampak positif sehingga dapat menciptakan kinerja terbaik dan meraih sukses yang berkelanjutan.

Tagline IMPACT ini merupakan citra yang harus ditunjukkan oleh seluruh lini pegawai di Set.PP. Tagline ini diharapkan menjadi nilai-nilai yang dihayati, diresapi, dan dilaksanakan sebagai amanah untuk setiap pegawai Set.PP.

Teks: ADP

JAN  
2023

# ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES

**NOTE:** PLEASE READ THE IMPORTANT NOTES ON COMPARING DATA AT THE START OF THIS REPORT BEFORE COMPARING DATA ON THIS CHART WITH PREVIOUS REPORTS



TOTAL  
POPULATION



**276.4**  
MILLION

URBANISATION

**58.2%**



CELLULAR MOBILE  
CONNECTIONS



**353.8**  
MILLION

vs. POPULATION

**128.0%**



INTERNET  
USERS



**212.9**  
MILLION

vs. POPULATION

**77.0%**



ACTIVE SOCIAL  
MEDIA USERS



**167.0**  
MILLION

vs. POPULATION

**60.4%**

**SOURCES:** UNITED NATIONS; GOVERNMENT BODIES; GSMA INTELLIGENCE; ITU; WORLD BANK; EUROSTAT; CNNIC; APJII; IAMAI & KANTAR; CIA WORLD FACTBOOK; COMPANY ADVERTISING RESOURCES AND EARNINGS REPORTS; OCDH; BETA RESEARCH CENTER; KEPIOS ANALYSIS. **ADVISORY:** SOCIAL MEDIA USERS MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. **COMPARABILITY:** SIGNIFICANT REVISIONS TO SOURCE DATA, INCLUDING COMPREHENSIVE REVISIONS TO POPULATION DATA. FIGURES ARE NOT COMPARABLE WITH PREVIOUS REPORTS. ALL FIGURES USE THE LATEST AVAILABLE DATA, BUT SOME SOURCE DATA MAY NOT HAVE BEEN UPDATED IN THE PAST YEAR. SEE NOTES ON DATA FOR FULL DETAILS.

we  
are  
social

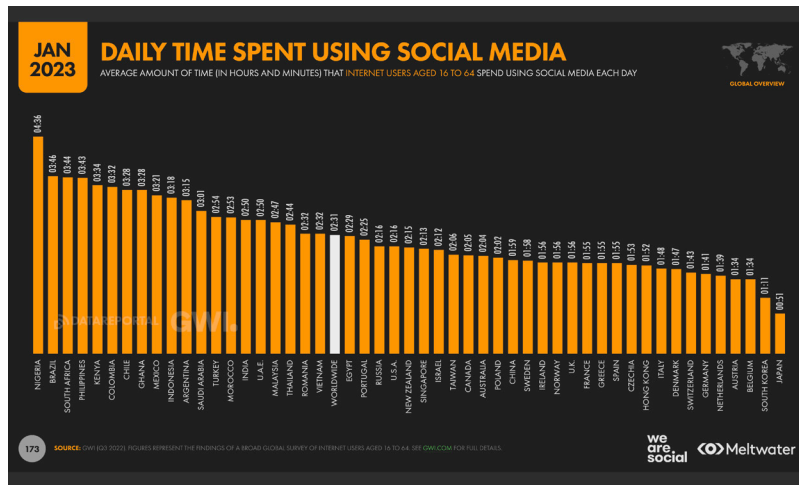
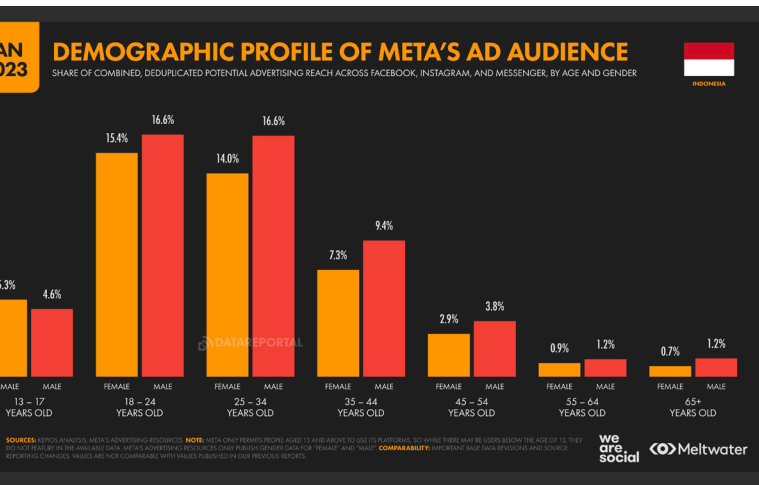
Meltwater

Sumber Infografis: [datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia](https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia)

## Fakta Media Sosial

*Serba Serbi Media Sosial di Indonesia*

Tahukan sobat TC-Media, dari 276,4 juta penduduk Indonesia, sebanyak 167 juta penduduk adalah pengguna aktif media sosial yang berasal dari beragam rentang usia. Berdasarkan data Januari 2023, kelompok usia yang mendominasi penggunaan media sosial ialah kelompok usia 18-24 tahun dan 25-34 tahun. Pada kelompok usia 18-24 tahun, persentase pengguna laki-laki adalah sebanyak 16,6% dan pengguna perempuan adalah sebanyak 15,4%. Begitu pula untuk kelompok usia 25-34 tahun, persentase pengguna laki-laki lebih tinggi daripada persentase pengguna perempuan.



Selain memiliki pengguna media sosial yang cukup banyak, Indonesia juga termasuk negara yang intensitas penggunaan media sosial per harinya cukup tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menempati posisi 10 teratas dengan jumlah rata-rata waktu penggunaan media sosial per hari sebanyak 3 jam 18 menit. Nigeria menempati posisi tertinggi dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial per hari sebanyak 4 Jam 36 menit, dan Jepang menempati posisi terendah yakni rata-rata waktu penggunaan media sosial per hari sebanyak 51 menit. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah berapakah sebaiknya batas waktu penggunaan media sosial per harinya?.

Hunt et. al. (2018) pada *Journal of Social and Clinical Psychology* menyatakan bahwa dengan membatasi penggunaan media sosial sekitar 30 menit per hari memungkinkan individu menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan terutama dalam mengurangi rasa kesepian dan depresi. Lebih lanjut, Steer et. al (2014) dalam penelitiannya membuktikan adanya hubungan antara kesehatan mental pengguna media sosial dan perbandingan sosial. Pola depresi yang tinggi ditemukan pada mereka yang terlibat pada perbandingan sosial di media sosial. Studi ini menyarankan pengurangan penggunaan media sosial bagi mereka yang beresiko mengalami depresi.

Sungguh ironis, media sosial yang bertujuan untuk membantu kita terhubung dengan orang lain pada kenyataannya dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Namun demikian, jika digunakan

dengan bijak dan positif, media sosial dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintahan, pendidikan, bisnis dan segala aspek kehidupan lainnya.

#### Media Sosial bagi Pemerintah dan ASN

Khan et. al. (2014) dalam studinya menyatakan bahwa media sosial menjadi perantara penting terhadap interaksi antar pemerintah, pemerintah dan warga negara, serta pemerintah dan bisnis. Hal ini disebabkan karakteristik media sosial yang unik yakni adanya keterbukaan, partisipasi, dan berbagi. Studi ini membuktikan bahwa media sosial membantu pemerintah dalam menciptakan citra dirinya yang lebih baik di antara warga negara, sebagai wadah pemerintah menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan warga terkait berbagai masalah, sebagai sarana memperoleh informasi yang sulit dijangkau di masyarakat, dan sebagai wadah menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah.

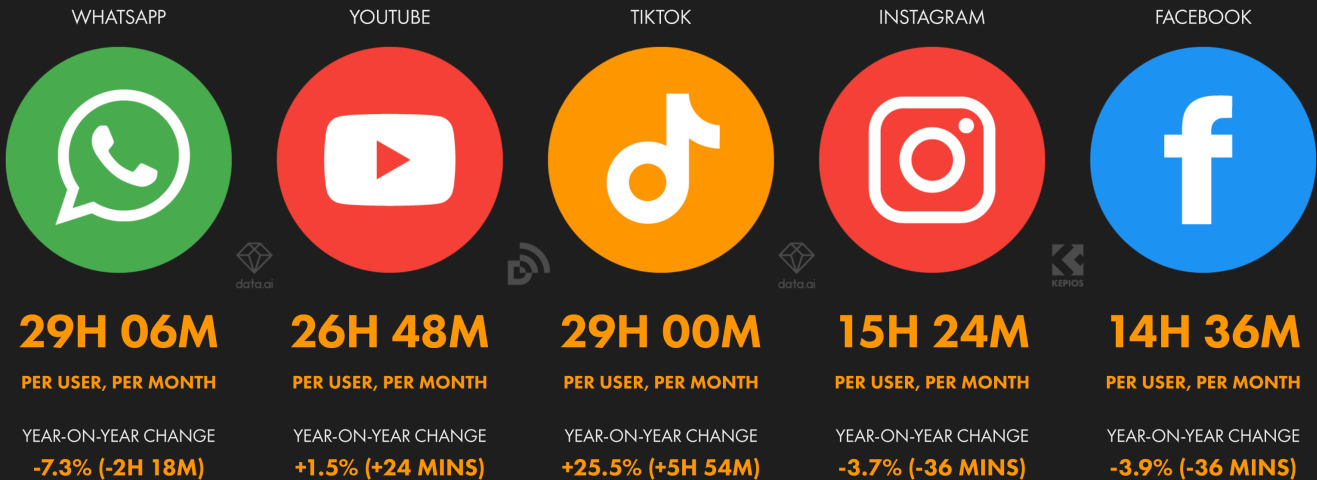
Senada dengan hasil penelitian di atas, manfaat media sosial bagi pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 83 Tahun 2012, antara lain: 1). menyebarkan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat, 2). membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial, 3). mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan, 4). membangun interaksi antara pemerintah dan



JAN 2023

# TIME SPENT USING SOCIAL MEDIA APPS

AVERAGE TIME PER MONTH THAT USERS SPEND USING EACH PLATFORM'S ANDROID APP



58

SOURCE: DATA.AI INTELLIGENCE. SEE DATA.AI FOR MORE DETAILS. NOTES: FIGURES REPRESENT AVERAGE NUMBER OF HOURS SPENT PER USER, PER MONTH USING EACH PLATFORM'S MOBILE APP ON ANDROID PHONES THROUGHOUT 2022. PLATFORMS ARE SHOWN IN RANK ORDER (LEFT TO RIGHT) BASED ON TOTAL, CUMULATIVE TIME SPENT ACROSS ALL USERS.

we are social | Meltwater

masyarakat, 5). meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah, serta 6). menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Peraturan Menpan RB tersebut juga mengatur bagaimana para praktisi pemerintah dalam beretika di media sosial, antara lain: 1). menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, 2). memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas, 3). menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan, 4). menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah, 5). menghormati kode etik pegawai negeri, 6). menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat, 7). menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan, dan 8). melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menpan RB dalam suatu kesempatan juga menyatakan secara resmi larangan ASN memamerkan harta kekayaan di media sosial. Keputusan ini, yang mana menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, bertujuan agar para praktisi pemerintah lebih peka dalam membangun hubungan dengan masyarakat. ASN yang bergaya hidup mewah dan memamerkan harta kekayaan di media sosial dapat mencederai suasana batin masyarakat (liputan6.com, 2023)

Teks: Mega



**Sosial Media**  
Foto  
Faishal

# Etika Bersosial Media

## Bersosial Media dengan penuh Kesadaran

Sosial media merupakan sebuah wadah yang tak terbatas penggunaannya. Banyak manfaat yang didapatkan penggunaannya. Pun banyak pula yang terjegal dan masuk ke sisi negatif yang merugikan pengguna itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa cara untuk dapat bermedia sosial dengan penuh kesadaran atau *mindful* sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal.

### Tidak Menyinggung SARA

Media sosial mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam sebuah wadah aplikasi. Tentu saja kita akan bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Seperti di kehidupan nyata, tentu kita harus menghormati suku, ras, agama, dan antargolongan ini. Dewasa ini, lingkup toleransi pun meluas hingga meliputi *gender*, pilihan politik, paham, serta pilihan-pilihan hidup tertentu. Boleh saja kita tidak setuju, tapi alangkah baiknya kita tetap menghormati aspek-aspek kehidupan seseorang selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

### Menjaga Etika Dan Cara Berkomunikasi

Memang ada perbedaan untuk etika dan cara berkomunikasi pada sosial media. Namun pada pelaksanaannya, memperlakukan orang lain dengan hormat dan sopan akan selalu menjadi pilihan terbaik. Sebagian besar dari interaksi sosial media terjadi melalui ketikan atau tulisan. Sangatlah baik bila kita pun terus memperbaiki literasi kita untuk dapat berkomunikasi dengan baik melalui tulisan ini.

### Menghargai Hak Cipta

Ada masanya kita membutuhkan ilustrasi, video, atau musik-musik pendukung pada posting media sosial kita. Sebelum *share*, pastikan dulu ilustrasi, video, atau musik-musik tersebut memang boleh untuk dipublikasikan secara luas. Bila anda mengetahui siapa kreatornya, tidak ada salahnya untuk memberikan kredit dengan mencantumkan namanya pada *post* anda. Berhati-hatilah bila menggunakan ilustrasi, video, musik, atau bahkan konsep sosial media ini bila anda memiliki tujuan untuk komersial. Tips untuk hal ini sederhana. Bila melihat sebuah karya, telusuri hingga ke sumber kreatornya untuk memastikan karya tersebut dapat digunakan untuk umum dengan kredit yang sesuai.

### Menjaga Data Pribadi

Batas ruang publik di sosial media memang tidak tampak. Oleh karena itu kita sendiri yang seharusnya membuat batasan-batasan tersebut. Termasuk data pribadi, baik data diri kita sendiri maupun data orang lain. Untuk data pribadi diri kita sendiri, pastikan untuk tidak menyebarkan data sensitif seperti data KTP, keuangan,



keluarga, dan lainnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mencegah kejahatan digital, tapi untuk dapat melindungi kita secara fisik di kehidupan nyata.

Ada kalanya *post* kita melibatkan orang lain. Dalam hal ini, orang terkait harus setuju untuk dapat kita *share* keterlibatannya. Misalnya kita bisa bertanya apakah kita bisa membagikan atau *share* ke media sosial saat kita berfoto bersama. Atau meminta izin untuk menyampaikan nomor WA seseorang ketika ada yang bertanya atau meminta kontakannya.

### **Mindful dan Sederhana**

Kanal media sosial pribadi kita memang menjadi lingkungan unik, privat sekaligus umum. Hal ini juga yang akan merepresentasikan pribadi kita. Pribadi kita yang ditunjukkan pada media sosial ini tentunya akan banyak dilihat oleh publik. Sebenarnya kita bebas untuk dapat menunjukkan apapun pada media sosial pribadi kita. Namun, kita pun perlu memperhatikan kebermanfaatan laman yang kita buat. Laman yang inspiratif, memiliki banyak tips, ikut membahagiakan orang lain, atau ikut membantu pada misi-misi baik tentu akan lebih dihargai dan disukai. Hindari *post-post* yang menunjukkan hedonisme, provokasi, dan hal-hal kurang bermanfaat lainnya.

### **Saling *sharing*, Bukan Saling Serang**

Pada waktu-waktu tertentu akan ada isu-isu yang menimbulkan perbincangan. Hal ini pun pasti akan memicu pendapat dari tiap individu baik yang setuju maupun tidak. Kembali pada poin menjaga etika dan cara berkomunikasi, pendapat kita juga dapat kita sampaikan atas nama pribadi dengan bahasa yang

baik dan sopan. Pembahasan isu pun biasanya juga dapat menggiring sebuah permasalahan menuju penyelesaian. Namun tidak jarang juga pembahasan isu ini memunculkan isu yang baru. Sebagai pengguna yang bijak, ada baiknya bila kita berpendapat untuk mendapatkan solusi dengan cara *sharing* pengalaman yang baik dan menghormati pendapat orang lain sehingga saling serang tidak terjadi.

### **Memeriksa Berita Sebelum Membagikan**

Isu hoax memang sudah menjadi lumrah sejak sosial media marak. Isu-isu hoax ini bergerak cepat dan sering menimbulkan masalah-masalah baru. Namun penyebaran hoax bisa dikendalikan dengan cara mengecek ulang sumber berita dan memastikan kebenarannya. Pilihlah kanal-kanal resmi dan terpercaya. Milikilah *mindset* yang mengacu pada fakta daripada pendapat yang tidak beralasan. Jangan bagikan berita –termasuk *like*, *love*, *retweet*, *repost*, dll—bila anda tidak dapat memastikan kebenarannya.

Cara berkomunikasi pada sosial media memang sedikit berbeda dengan cara berkomunikasi langsung. Tak jarang seseorang memiliki persona yang berbeda di kehidupan nyata dan kehidupan media sosialnya. Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita tetap berbuat baik dan menjaga sikap baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan media sosial.

---

Teks: ADP

---



# HATI-HATI DENGAN JARIMU!

Surat Edaran Nomor SE-16/MK.01/2018 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai Kementerian Keuangan.

Dalam menggunakan medsos, harus menghindari :

**HOAX**

1. Mengunggah dan/atau share konten hoaks.



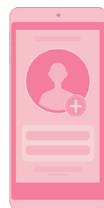
2. Mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

**CONFIDENTIAL**

3. Mengunggah konten yang mengandung informasi rahasia pekerjaan, negara atau informasi yang belum dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang.



4. Tidak mengunggah hal-hal yang menyiratkan pemborosan APBN saat melaksanakan perjalanan dinas.



5. Menggunakan kata "Kemenkeu", "Kementerian Keuangan", "Kemenkeuri" dan kata-kata sejenis yang terkait Lembaga Kementerian Keuangan di dalam nama akun pribadi.

"Dalam perjalanan hidup, kalau melihat kekurangan, maka perbaiki. Tidak usah mengeluh, apalagi mencaci di media sosial. Jadilah pribadi yang kritis tanpa menjadi sinis. Jadi generasi yang positif dan konstruktif, bukan destruktif."

-Sri Mulyani Indrawati



# Reformasi Perpajakan

## Mengenal Lebih Dekat Dunia Perpajakan Bagian I

Pajak menjadi salah satu komponen penting hampir di seluruh negara di dunia. Setiap negara memiliki aturan dan skema pengembangan peraturan terkait perpajakan di masing-masing negaranya. Pajak menjadi hal yang dikenal masyarakat sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Dalam artikel kali ini, penulis akan membagikan beberapa informasi guna menambah pengetahuan pembaca mengenai perpajakan.

**H**al pertama yang akan dibahas adalah hal dasar yang terkait dengan subjek pajak dan hal hal administratif terkait. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan ( UU KUP), lokasi daripada pendaftaran seorang wajib pajak ialah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada. Saat ini subjek pajak di Indonesia harus memenuhi ketentuan syarat subjektif maupun objektif. Pada tahun tahun sebelumnya, umumnya masyarakat akan melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila syarat objektif (terpenuhinya kondisi dimana wajib pajak memperoleh penghasilan) terpenuhi. Namun saat ini kondisi mulai berbeda dimana mayoritas pekerjaan telah memberikan syarat awal pada saat pendaftaran dengan keberadaan NPWP sebagai salah satu dokumen yang harus disertakan dalam proses pelamaran pekerjaan.

Terhitung mulai 14 Juli 2022, terdapat beberapa perbaikan dalam hal pengenaan NPWP dimana saat ini khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, telah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Saat ini sudah ada 54 juta NIK yang sudah menjadi NPWP. Adapun penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki NIK bisa mendapatkan status wajib pajak dan melalui program ini diharapkan kesadaran wajib pajak semakin tinggi. Perubahan ini dikarenakan masih banyak ditemui masyarakat yang telah bekerja namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga peluang kecurangan pajak baik dari sisi penduduk selaku orang pribadi maupun badan usaha menjadi lebih tinggi.

Selanjutnya dalam aspek jenis wajib pajak, perpajakan Indonesia memiliki beberapa jenis wajib pajak antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Adapun dari beberapa jenis wajib pajak yang disebutkan, wajib pajak warisan belum terbagi memiliki pendefinisian baru dimana warisan yang belum terbagi menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2022.

Peraturan lainnya yang diperbarui adalah dalam hal penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 50 Tahun 2022, DJP karena jabatannya dapat melakukan penghapusan NPWP dan/atau mencabut pengukuhan PKP berdasarkan pemeriksaan dan penelitian.

Hal lain yang dijelaskan dalam UU HPP yang baru adalah dalam kaitannya dengan pengenaan sanksi dalam situasi wajib pajak tidak menyampaikan SPT ataupun membuat pembukuan. Perubahan sanksi terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar juga diakibatkan antara lain untuk wajib pajak tidak menyampaikan SPT setelah mendapat surat teguran PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak

dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, serta tidak memenuhi kewajiban Pasal 28 atau Pasal 29 yang menyebabkan pajak terutang tidak dapat diketahui.

Sebelum UU HPP dibentuk, wajib pajak yang tidak membuat SPT akan dikenakan sanksi sebesar 50% untuk jenis SPT PPh kurang dibayar, dan 100% untuk SPT dengan uraian PPh kurang potong, PPh dipotong tetapi tidak disetor, dan PPN serta PPnBM kurang dibayar. Dalam perkembangannya, pada UU HPP disampaikan bahwa sanksi bunga akan dikenakan sesuai dengan suku bunga acuan ditambah uplift factor 20% per bulan dengan maksimal periode pengenaan sanksi maksimal 24 bulan untuk SPT dengan uraian PPh kurang dibayar dan PPh kurang dipotong. Adapun untuk SPT yang PPh dipotong tetapi tidak disetor maupun SPT dengan PPN dan PPnBM kurang dibayar maka dikenakan sanksi sebesar 75%.

Hal lain yang juga dibahas dalam UU HPP adalah sanksi dalam kaitannya setelah adanya upaya hukum. Sanksi yang dikenakan pada proses keberatan pada UU KUP yang lama akan dikenai sanksi sebesar 50%, namun pada UU HPP dikenai 30%. Selanjutnya pada upaya hukum berupa Banding, jika pada UU KUP dikenakan 100%, maka pada UU HPP dikenakan sebesar 60%. Hal yang sama juga dikenakan pada upaya hukum peninjauan Kembali. Adapun dasar nilai yang digunakan ialah selisih dari nilai akhir tunggakan pajak dikurangi pajak yang sudah dibayar.

Demikian pembahasan artikel terkait dengan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan di Indonesia bagian 1 selanjutnya pada artikel berikutnya akan dibahas hal-hal lain terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, Cukai, dan Ketentuan Peralihan, pada edisi berikutnya. Jangan lewatkan, ya.

---

Teks: Tirta

---



# Penegakan Disiplin Jam Kerja

---

*Untuk SDM yang Berintegritas dan  
Profesional*

Integritas merupakan sesuatu yang sangat berharga, tidak bisa diperjualbelikan, dan harus dijaga secara terus menerus keberadaannya. Integritas menjadi salah satu nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang erat kaitannya dengan nilai profesionalisme. Nilai-nilai Kemenkeu merupakan pondasi dalam pembentukan PMK No. 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 190 Tahun 2018).

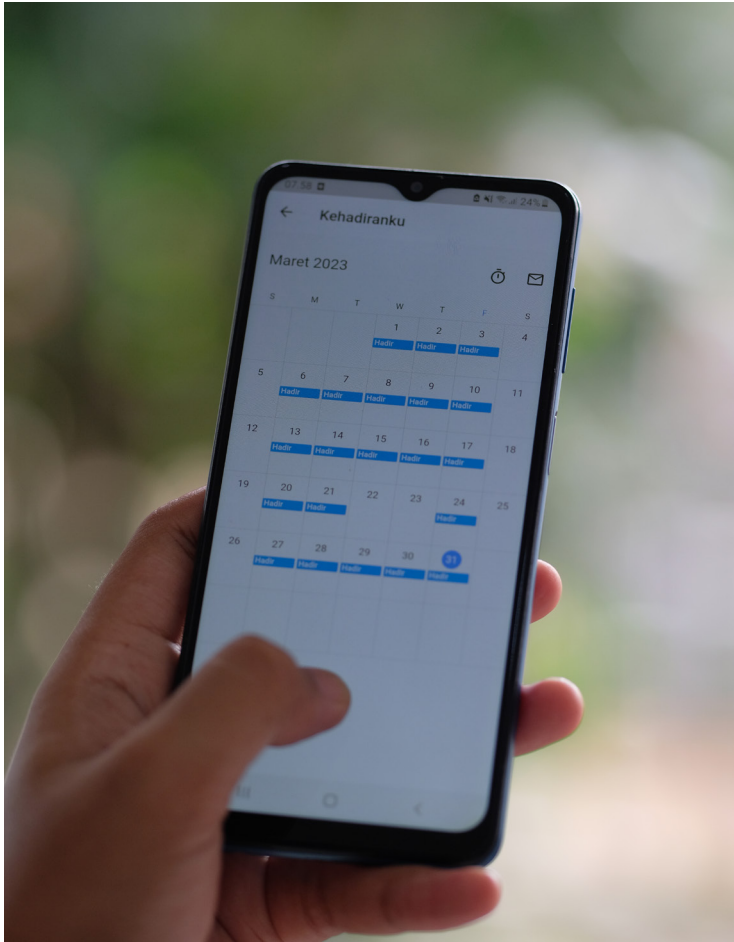


Foto: Faishal

**B**erkaitan dengan nilai integritas dan nilai profesionalisme, telah diatur bahwa pegawai harus mempunyai sikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja, berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas berdasarkan fakta sesuai ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan bertanggung jawab hingga tuntas.

Salah satu filosofis lahirnya PMK 190 Tahun 2018 yaitu untuk mencegah pelanggaran disiplin serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu. Persentase jumlah PNS Kemenkeu yang melakukan pelanggaran disiplin diharapkan dapat diminimalisasi apabila semua pegawai menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan kode etik dan kode perilaku dimaksud. Namun, hingga saat ini implementasi kode etik dan kode perilaku belum diterapkan sepenuhnya oleh seluruh pegawai.

Perbedaan sifat masing-masing pegawai dan

karakteristik setiap unit kerja ditambah dengan banyaknya jumlah PNS Kemenkeu di seluruh Indonesia menjadi salah satu kendala dalam akselerasi penerapan hal tersebut. Dampaknya, hingga saat ini masih terdapat beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran bersifat administratif yaitu pelanggaran jam kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja secara kumulatif minimal selama 3 hari kerja dalam 1 tahun maka dapat dijatuhi hukuman disiplin. Atasan Langsung (Atsung) telah berupaya melakukan pembinaan sampai dengan penegakan kode etik dan kode perilaku, namun pelanggaran tersebut sering terjadi berulang sehingga upaya selanjutnya dilakukan melalui penegakan disiplin agar memberikan efek jera kepada pegawai tersebut.

### **Disiplin PNS dan Dampak Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kemenkeu**

Berkaitan dengan Disiplin PNS mengenai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di lingkungan Kemenkeu, terdapat beberapa ketentuan antara lain PMK No. 221 Tahun 2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK No. 221 Tahun 2021) dan KMK No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK No 5 Tahun 2022).

Prinsip dasar dari PMK No. 221 tahun 2021 diantaranya tidak mengurangi jam kerja pegawai di Kemenkeu (tetap 07.30 - 17.00) namun hanya mengubah *flexy time* dari 30 menit menjadi 90 menit sehingga apabila di pagi hari ada keperluan tertentu maka pegawai dapat menyesuaikan jam kerja sendiri. Selain memperhatikan *work-life integration*, diharapkan pegawai tetap mengedepankan integritas, produktivitas, dan kinerja. Selanjutnya, media presensi yang digunakan saat ini menggunakan aplikasi [satu.kemenkeu.go.id](https://satu.kemenkeu.go.id) dan khusus untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, sejak bulan Januari 2023 diwajibkan menggunakan aplikasi *mobile Satu Kemenkeu* dan sejak bulan Maret 2023 mekanismenya dilakukan dengan turut mencantumkan posisi geografis (*geotagging*).



Hal lain yang perlu diperhatikan dalam PMK No. 221 Tahun 2021 yaitu bagi pegawai yang sekadar melakukan pengisian presensi namun tidak melaksanakan tugas, maka dapat dikenakan sanksi. Atsung dapat membuat surat keterangan bahwa bawahannya tidak melaksanakan tugas dan tidak dapat menyampaikan bukti hasil kerja sehingga dianggap sebagai pelanggaran jam kerja. Pegawai dapat dinyatakan tidak melaksanakan tugas apabila terdapat unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan tugas berdasarkan hasil penelitian Atsung, tidak dapat menunjukkan hasil kerjanya berdasarkan pengisian daftar hadir yang dilakukan, dan/atau tidak melaksanakan tugas bukan disebabkan oleh ketidakmampuannya atau faktor eksternal di luar kendali dirinya seperti keterbatasan sarana/prasarana dan kondisi kesehatan. Optimalisasi peran Atsung sangat diperlukan sebagai coach karena dasar untuk menyatakan pegawai tidak melaksanakan tugas adalah dengan memperhatikan upaya *coaching/konseling* yang telah dilaksanakan minimal 2 kali dan tidak terdapat iktikad baik atau perbaikan kinerja minimal 1 bulan sejak pegawai mendapatkan *coaching/konseling* pertama.

KMK No 5 Tahun 2022 merupakan petunjuk pelaksanaan mengenai disiplin PNS di lingkungan Kemenkeu. KMK ini mengatur terkait pelanggaran yang bersifat administratif misalnya pelanggaran jam kerja dan pelanggaran yang bersifat non administratif misalnya tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. KMK No. 5 Tahun 2022 juga mengatur terkait dengan penerapan pemotongan tunjangan sebagai dampak penjatuhan hukuman disiplin baik yang bersifat administratif maupun non

administratif, di mana khusus untuk pemotongan tunjangan akibat penjatuhan hukuman disiplin jam kerja masih mengacu pada Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2012.

Penegakan disiplin erat kaitannya dengan sistem karir dan sistem prestasi yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir PNS di lingkungan Kemenkeu. Beberapa ketentuan Manajemen Karir di lingkungan Kemenkeu mengatur bahwa rekam jejak penjatuhan sanksi kode etik dan/atau hukuman disiplin pada PNS menjadi bahan pertimbangan dalam proses mutasi dan/atau promosi. Selain itu terdapat beberapa norma yang terkait lainnya antara lain dalam penilaian grading pelaksana dan penghargaan kepada pegawai diantaranya tidak dapat dipertimbangkan apabila sedang menjalani hukuman disiplin. Dengan demikian, diharapkan agar kesadaran diri masing-masing pegawai dapat lebih ditingkatkan karena pelanggaran jam kerja bukan semata-mata pelanggaran administratif yang hanya berdampak pada pemotongan tunjangan.

**Disclaimer :** *Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.*

---

**Teks:**  
Ika Fitria Pasurya

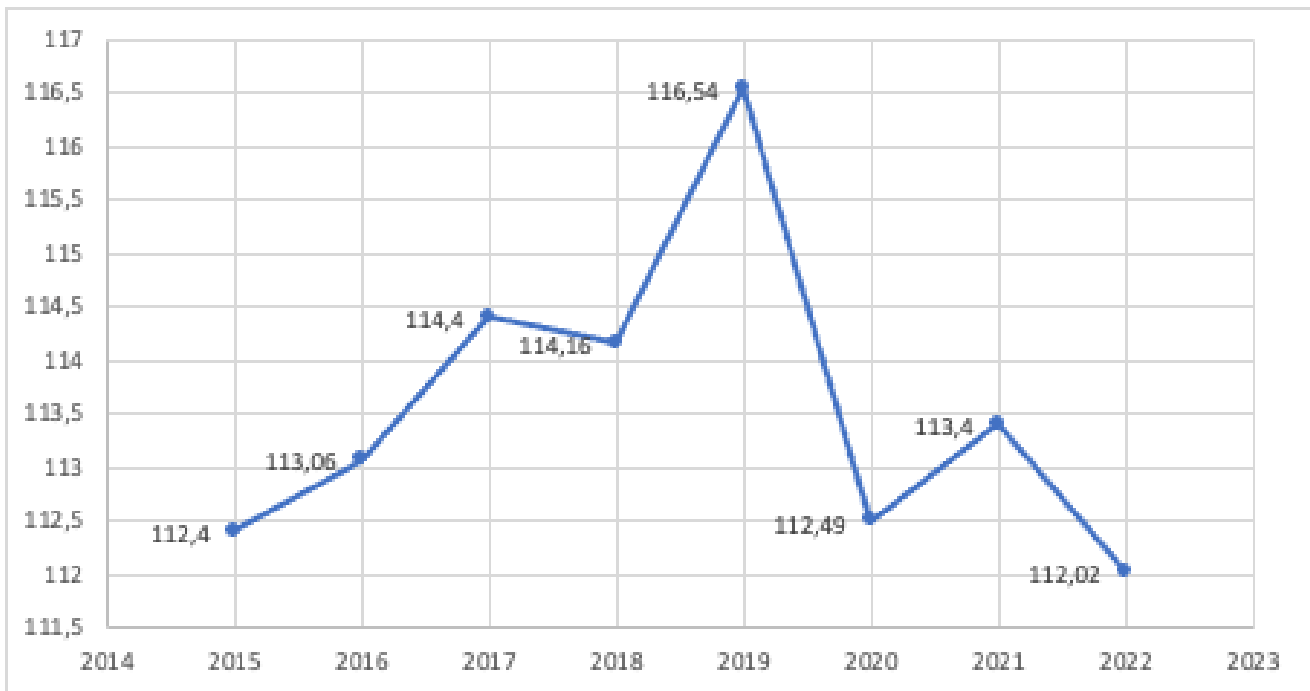
---

# Nilai Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak (LAKIN SetPP) merupakan suatu laporan yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak. LAKIN ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja

Set.PP serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan. Salah satu indikator dari evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO Set.PP tahun 2022 adalah sebesar 112,02. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap-tiap perspektif sebagaimana tersaji pada data di bawah ini:

Perspektif	Bobot	Nilai
<b>Stakeholder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Administrasi dan Persidangan Sengketa Pajak yang Andal</li> </ul>	25%	25,35
<b>Customer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak yang Andal dan Akuntabel</li> </ul>	15%	18,00
<b>Internal Process</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Administrasi Berkas Banding dan Gugatan yang Andal</li> <li>Dukungan Administrasi Berkas Sengketa Siap Sidang yang Andal</li> <li>Dukungan Administrasi Persidangan yang Andal</li> <li>Dukungan Administrasi Penyelesaian dan Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak yang Andal</li> <li>Dukungan Administrasi Peninjauan Kembali yang Andal</li> <li>Pengendalian Mutu yang Efektif</li> </ul>	30%	34,80
<b>Learning and Growth</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi dan SDM Sekretariat Pengadilan Pajak yang Agile dan Kolaboratif</li> <li>Pengelolaan Keuangan, Kearsipan, dan BMN Sekretariat Pengadilan Pajak yang Kredibel, Akuntabel, dan Kolaboratif</li> <li>Sistem Informasi Sekretariat Pengadilan Pajak yang Andal dan Kolaboratif</li> <li>Pengendalian Internal Sekretariat Pengadilan Pajak yang Efektif</li> </ul>	30%	33,87
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>112,02</b>



Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa NKO Set.PP dalam delapan tahun terakhir berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja instansi telah melebihi target yang ditetapkan. Namun, NKO Set.PP pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, hal ini tidak dapat dibandingkan karena perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kondisi tiap-tiap tahun yang berbeda.

Kondisi pandemi Covid-19 masih terus berlangsung selama tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Set.PP harus dilakukan dengan pola kerja normal baru. Set.PP telah beradaptasi dengan pandemi sehingga

berhasil meraih NKO di atas target ( $\geq 100$ ). Pada tahun 2022, Set.PP pun telah melaksanakan transformasi yang merupakan bagian dari target kinerja tahun 2022 sebagai upaya dalam meningkatkan layanan kepada pemangku kepentingan. Dengan nilai NKO tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja dapat dipenuhi dengan baik oleh Set.PP.

Teks: Hafiz



Atas: Daffa Mumtas Zaky, Deni Prabowo, Hanif Arifanto, Ayala Putra Pangestu, Juandry Eryck Sitanggung  
Bawah: Irvan Hasyim Amin, Via Sarsadilla, Anggita Fatmawati Putri, Nurul Fina Farhana, Muhammad Hilmy Fuad

## Generasi Baru Set.PP

Pada Senin, 6 Maret 2023, Set.PP mendapatkan sepuluh orang pegawai baru yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebuah kabar yang menggembirakan tentunya, mendapati lahirnya generasi baru Set.PP pada awal tahun 2023.

Proses penerimaan pegawai baru ini sebenarnya sudah diawali dengan kegiatan *On The Job Training* (OJT) yang dilaksanakan sepanjang Bulan Februari 2023. Sebanyak Sembilan belas pegawai baru Sekretariat Jenderal diberikan tugas untuk mengenai lima unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dari Sembilan belas orang ini, sepuluh diantaranya ditempatkan secara definitif di Set.PP.

Proses yang panjang telah dilalui oleh sepuluh pegawai baru Set.PP ini sebelum akhirnya mengemban amanah sebagai pegawai Set.PP. Proses ini termasuk kegiatan perkuliahan yang harus mereka jalani dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 dalam kondisi Pandemi COVID-19, sehingga diantara enam semester perkuliahan, mereka hanya mengalami satu semester perkuliahan secara luring dan sisanya dilakukan secara daring.

Setelah berhasil lulus sebagai mahasiswa, proses yang harus dilalui adalah mengikuti tes seleksi selayaknya CAT bagi calon CPNS dan memilih prioritas instansi tujuan diantara puluhan hingga ratusan pilihan. Sebagian besar dari mereka memilih instansi Kementerian Keuangan sebagai pilihan pertama. Akan tetapi tidak demikian bagi Hanif Arifanto, Daffa Mumtas Zaky, dan Anggita Fatmawati Putri, mereka memilih selain Kementerian Keuangan dengan

## Pegawai Baru

Foto  
Faishal

alasan yang serupa, yaitu agar mendapatkan tempat penugasan yang lebih dekat dengan rumah atau *homebase* masing-masing.

Selama masa penantian untuk ditempatkan, masing-masing dari mereka sudah menyiapkan berbagai hal untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Muhammad Hilmy dan Juandry Eryck Sitanggang menyiapkan hal yang sama, yaitu bersiap-siap jika harus ditempatkan jauh dari keluarga. Berbeda halnya dengan Ayala Putra Pangestu, ia mengisi masa-masa penantian dengan memanfaatkan waktu untuk membantu orang tua dan mengerjakan hobinya seperti futsal dan hiking sebelum pergi merantau untuk bekerja.

Bagi Anggita Fatmawati Putri, persiapan menuju dunia kerja bahkan sudah dimulai ketika masih berkuliah, “Sejak kuliah, saya sudah terbiasa hidup dengan aturan dan mengaplikasikan nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan di kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, saya harus terus memiliki semangat mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia.”

Lantas bagaimana kesan mereka terhadap Set.PP? Sebagian besar dari kesepuluh pegawai baru ini sudah mendengar Set.PP sebelumnya. Dari beragam informasi dan kesan yang mereka terima, Set.PP dikenal sebagai instansi dengan beban kerja yang sangat tinggi dengan berkas yang banyak. Namun, ketika sudah mencicipi bekerja di Set.PP ketika masa OJT, kesan itu dilengkap dengan banyak hal.

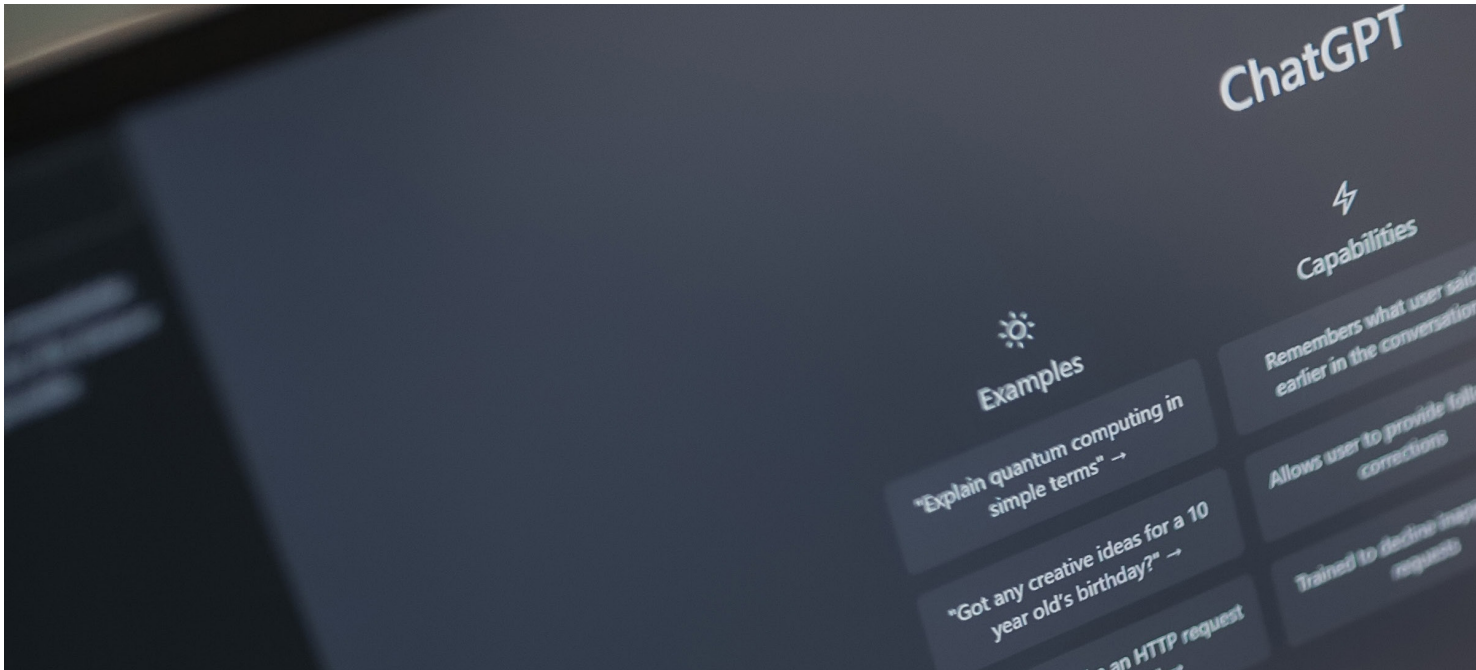
Ayala Putra Pangestu mengungkapkan, “Saat saya melaksanakan OJT dan bekerja di sini, saya merasakan bahwa orang-orang yang bekerja disini sangatlah *care* dan baik antar sesama, apalagi Pak Ses yang memiliki aura baik hati kepada para pelaksananya”. Hal senada diungkapkan Nurul Fina Farhana, “Kesan pertama saat melihat, sedang OJT, dan bekerja di Set.PP adalah orang-orangnya yang sangat *welcome*. Selain itu, banyak pula dibentuk komunitas bagi para pegawai sebagai sarana *healing* untuk mengimbangi pekerjaan yang cukup kompleks.”

Dalam masa-masa awal bekerja di Set.PP kira-kira apa rencana mereka ke depan? Dan apa mimpi mereka sebagai seorang PNS kelak? Via Sarsadilla, wanita kelahiran Perawang, menyampaikan bahwa yang akan ia kejar terlebih dahulu adalah melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan kemudian menikah. Tidak sampai situ saja, Via Sarsadilla ternyata memiliki ketertarikan pada Psikologi dan memiliki impian untuk dapat menempati jabatan yang berhubungan dengan bidang Psikologi.

Berbeda halnya dengan Juandry Eryck Sitanggang yang memiliki rencana untuk segera kuliah S1 dan memperbanyak *saving* sebagai investasi masa depan. Daffa Mumtaz Zaky memiliki rencana yang berbeda, ia memiliki rencana untuk dapat menghantarkan orang tuanya menunaikan ibadah umroh dan kelak kemudian ingin bekerja di daerah Jawa Timur, sebagai daerah tempat tinggalnya. Terkait mimpi masa depan, Anggita Fatmawati Putri dan Deni Prabowo memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi Direktur Jenderal Pajak. Semoga harapan teman-teman bisa terwujud ya.

Terakhir mengenai harapan dari pegawai baru ini untuk Set.PP diantaranya adalah agar Set.PP menjadi lebih baik dan menjadi tempat berkarier yang baik. Semua pegawai baru ini menjawab dengan hal yang sama yaitu agar Set.PP dapat segera bertransformasi menuju digitalisasi sehingga seluruh proses bisnis dapat dilakukan tanpa kertas, menjadi lebih cepat, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Sebuah harapan besar yang juga sedang diupayakan segera terwujud dengan adanya e-Tax Court kelak. Semoga dengan hadirnya sepuluh pegawai sebagai generasi baru di Set.PP dapat memberikan kekuatan tambahan untuk melakukan upaya perbaikan dan perubahan menuju lebih baik.

Teks: Heru



# CHAT GPT

## Manfaat dan Penggunaanya

“

Inilah keunggulan dari kecerdasan buatan ini, dimana ia mampu mengelola dan memahami dialog manusia, serta memberikan solusi atau jawaban seperti manusia pula. Pengguna bisa menggunakan produk OpenAI ini melalui chat.

Chat GPT adalah robot atau *chatbot* berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Kecerdasan buatan ini mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Interaksi percakapan yang terjadi pun dapat terlihat sangat natural. Kamu seperti tidak sedang berbicara dengan robot.

Istilah GPT merujuk pada *Generative Pre-Trained Transformer*, dimana chatbot akan memberikan jawaban persis manusia seperti manusia saat pengguna mengirimkan perintah atau pertanyaan. Jawaban yang diberikan berbentuk teks otomatis. Contohnya, pengguna dapat mengirimkan perintah untuk membuat teks *copywriting*. Nah, AI akan mengelola pertanyaan dan memberikan jawaban berbentuk teks *copywriting* dengan gaya bahasa yang diinginkan pengguna. Bahkan, platform ini dapat memberikan struktur bahasa dan teks yang benar sesuai dengan aturan yang ada.

Selain teks *copywriting*, teknologi ini juga mampu membuat hal lain seperti membuat puisi, mendeskripsikan suatu hal atau benda, menjelaskan cara kerja, menulis esai, membuat rencana perjalanan, membuat musik, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, AI ini mampu memberikan jawaban dari pertanyaan yang tergolong rumit. Jadi, kamu bisa belajar suatu materi dan bertanya kepada AI jika tidak memahami

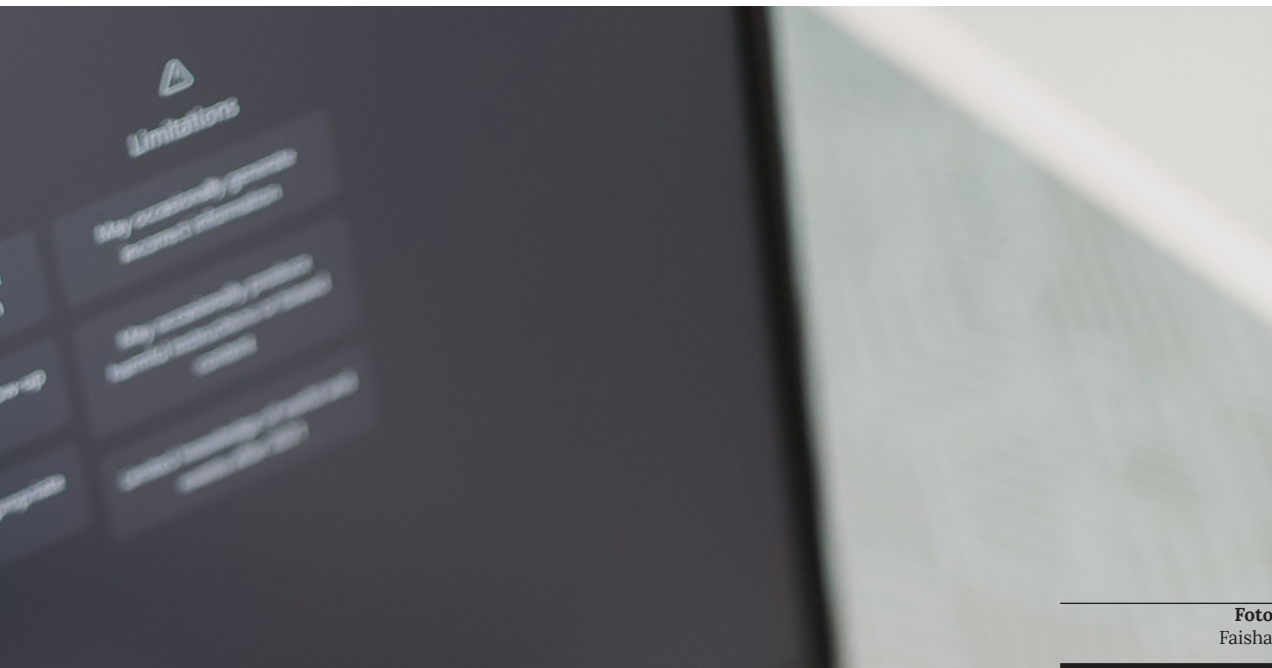


Foto:  
Faishal

sesuatu. Karena ChatGPT dapat memberikan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi.

Inilah keunggulan dari kecerdasan buatan ini, dimana ia mampu mengelola dan memahami dialog manusia, serta memberikan solusi atau jawaban seperti manusia pula. Pengguna bisa menggunakan produk OpenAI ini melalui chat.

Cara kerja chatbot menggunakan algoritma dan konten internet yang telah ada sebelumnya untuk menciptakan hal baru seperti teks, video, kode, gambar, dan lain sebagainya. Platform ini dikembangkan berlandaskan GPT-3.5, yaitu suatu model bahasa alami yang menghasilkan teks dengan ukuran lebih panjang dalam hitungan detik.

### **Batasan ChatGPT**

Pihak OpenAI mengakui ada beberapa batasan pada ChatGPT. Pada halaman awal ketika melakukan *login*, laman ChatGPT akan menampilkan beberapa batasan yang dimiliki. Salah satunya adalah bisa menghasilkan informasi yang tak tepat. Tak hanya itu, platform mungkin juga menghasilkan konten atau instruksi yang berbahaya. Platform ini juga terbatas pada kejadian dan pengetahuan yang terjadi hingga tahun 2021.

Di sisi lain, pihak OpenAI juga membuat sebuah platform yang bisa mendeteksi teks buatan

platform AI yang dinamai 'The Classifier'. Classifier bisa membantu memberantas penggunaan teks AI yang sering mengklaim hasil karya mereka. Namun, platform tersebut masih belum matang, sehingga masih memerlukan bantuan metode lain.

ChatGPT ini juga memiliki potensi pemanfaatannya untuk Set.PP antara lain sebagai *Chatbot* dalam otomasi kegiatan layanan informasi secara online, membantu mencari informasi dengan lebih fleksibel ketimbang menggunakan *google search*, dan dapat membantu penyusunan laporan kegiatan dan sehingga pengguna lebih berperan sebagai penyedia data dan editor ketimbang penulis laporan itu sendiri.

Itulah penjelasan mengenai apa itu ChatGPT, kegunaan, cara menggunakan, kelebihan, dan kekurangannya. Semoga membantu ya.

Teks: Adiyat



Membaca bersama Anak  
Ilustrasi  
Kasya

# Literasi Keuangan Anak

## Memperkenalkan Keuangan secara Menyenangkan

“ Penelitian Cambridge mengatakan bahwa *financial habit/ financial pattern* anak terbentuk pada usia tujuh tahun. Oleh karena itu, usia tersebut, anak harus sudah dikenalkan dengan literasi keuangan. Semakin awal dikenalkan dengan keuangan, maka semakin bagus, namun tidak ada kata terlambat untuk memulai.

**W**orld Read Aloud Day atau Hari Membacakan Nyaring Sedunia merupakan hari merayakan anjuran membacakan nyaring dan dirayakan di lebih dari 170 negara di dunia. World Read Aloud Day dirayakan setiap hari Rabu pertama di bulan Februari yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 1 Februari 2023. Peringatan ini sendiri digagas oleh LitWorld, organisasi nirlaba yang didirikan oleh pakar literasi Pam Allyn pada tahun 2007 untuk memberdayakan dan memperkuat komunitas anak-anak melalui kekuatan cerita.

## Rayakan World Read Aloud Day dengan Literasi Keuangan Anak

Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, memaknai, mencipta, serta berkomunikasi menggunakan materi cetak dan tertulis dalam beragam konteks (UNESCO). Menurut Clay (2001), literasi usia dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah.

Pengalaman anak dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.

### Membaca Nyaring Membangun Kosakata

Bagaimana anak bisa mengucapkan, membaca, atau menuliskan suatu kata jika dia tidak pernah mendengar kata tersebut? Anak usia dini perlu mendapatkan buku-buku yang sesuai dengan minat dan kemampuan berpikir mereka. Pemilihan buku yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak sangat penting supaya nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui buku tersebut dapat dipahami.



Membacakan buku dengan nyaring adalah komitmen untuk meluangkan waktu untuk memilihkan buku atau cerita yang dibacakan kepada anak. Aktivitas ini dilakukan setiap hari sehingga anak terbiasa mendengar, kemudian mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Dalam proses membacakan buku dengan nyaring, kita sebagai orang tua mengenalkan gambar, suara, aneka kosakata dengan beragam bentuk dan makna. Saat bejana otaknya terisi dengan stimulasi ini, anak akan menirukan dan menanggapi bacaan secara lisan. Hal ini menjelaskan bagaimana kegiatan menyimak dapat meningkatkan kemampuan anak berbicara, membaca, kemudian menulis.

Suasana menyenangkan yang tercipta saat kita sebagai orang tua membacakan nyaring akan tertanam dalam benak anak. Saat membacakan buku, sebaiknya menghindari mengomel, memerintah, atau melarang. Nada dan intonasi yang menyenangkan akan membuat anak nyaman. Anak yang senang membaca akan tumbuh menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat.

Sebagai orang tua yang bekerja, kegiatan membaca buku bersama anak merupakan kegiatan yang penting karena dapat meningkatkan *bonding* orang tua dan anak. Kegiatan ini mudah dilaksanakan, *less energy*, dan dapat meningkatkan literasi. Wah, bagai sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui ya.

### Bagaimana dengan literasi keuangan anak?

Buku cerita bergambar merupakan media yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan dan kecakapan literasi finansial dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Sebelum membacakan buku-buku cerita yang memperkenalkan konsep literasi finansial kepada anak, sebaiknya dipastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memahami cerita dan konsep literasi finansial yang terkandung dalam buku tersebut.

Penelitian Cambridge mengatakan bahwa *financial habit/ financial pattern* anak terbentuk pada usia tujuh tahun. Oleh karena itu, usia tersebut, anak harus sudah dikenalkan dengan literasi keuangan. Semakin awal dikenalkan dengan keuangan, maka semakin bagus, namun tidak ada kata terlambat untuk memulai.

Sebagai orang tua kita tentu harus banyak membaca dan terus belajar bagaimana mengajarkan konsep keuangan yang tepat bagi anak. Tujuan financial parenting adalah bagaimana orang tua mengajarkan anak untuk hemat dan cermat dalam mengelola keuangan, tidak terlalu boros atau pelit, dan tetap memperhatikan lingkungan sosialnya. Selain itu, penting juga untuk mengenalkan waktu pada anak yaitu bukan “*pay later*” tapi “*by later*”, yakni menabung dahulu baru bisa membeli benda yang diinginkan.

Sobat TC Media, berikut rekomendasi buku cerita tema literasi keuangan yang dapat digunakan untuk membaca nyaring bersama anak, yaitu:

#### 1. Buku Hamu dan Biji Bunga Matahari, penulis: Nurhuda dan Winda.

#### 2. Buku Seri Literasi Keuangan Untuk Paud dari OJK, dengan 4 judul seri, yaitu;

- Penghapus Rama (Penulis: Evi Indriani, dan Ilustrator: Fanny Santoso)
- Olin Menabung (Penulis: Evi Indriani, dan Ilustrator: Nabila Adjani)
- Yena dan Uang Hijau (Penulis: Eva Y. Nukman, dan Ilustrator: Eugenia Gina)
- Ketika Lilo Piknik (Penulis: Irawati Subrata, dan Ilustrator: Evi Shelvia)

Seri buku ini dapat diunduh secara gratis melalui minisite, yaitu [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

#### 3. Buku Edukasi Keuangan Anak “Ruby Cari Uang”, penulis: Tascha Liudmila.

Selain itu, Sobat TC Media juga dapat membaca buku anak gratis, melalui laman:

- [reader.letsreadasia.org](http://reader.letsreadasia.org)
- [iteracycloud.org](http://iteracycloud.org)
- [serusetiapsaat.com](http://serusetiapsaat.com)
- [www.rumahdongengmentari.com/10-dongeng-nusantara](http://www.rumahdongengmentari.com/10-dongeng-nusantara)
- [bloomlibrary.org](http://bloomlibrary.org)

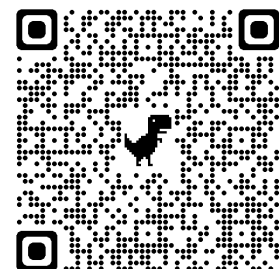
Jadi, bagaimana Sobat TC Media, sudahkah Sobat TC Media membaca buku bersama anak hari ini?

Teks: Kasya

# QUIZ TIME!



**Bantu domba diatas menuju jalan pulang,  
serta jawab pertanyaan di qr code berikut  
ini. Menangkan hadiah menarik bagi  
peserta kuis yang beruntung!**



# It's **TACO** Time!

## MEWAH

Sekarang kan lagi sering viral berita tentang ASN.  
Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran ya co?



Pelajarannya kita sebagai ASN jangan  
hidup mewah.



Kita juga harus bisa  
hidup kuning, hijau,  
dilandang yang biwu.



Itu bukannya lirik lagu anak ya...





SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL



e-registration | e-filing | e-litigation | e-Putusan | dashboard